

## PERBANDINGAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA ERA SOEHARTO DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Allysa Qurrotu'ainy Ciremai  
allysaqc@gmail.com

### ABSTRAK

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia kerap mengalami pasang dan surut. Begitu pula pada era Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jurnal ini ditulis menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai perbandingan hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pada waktu tertentu, yaitu era kepemimpinan Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak dapat dikatakan bahwa hubungan antara Indonesia dengan Australia pada era Presiden Soeharto lebih baik dibanding hubungan antara Indonesia dengan Australia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, begitu pula sebaliknya. Meski sempat dipandang baik, namun hubungan bilateral kedua negara pada era Soeharto mulai memudar akibat konflik Timor Timur. Pun pada era Susilo Bambang Yudhoyono, hubungan baik kedua negara pun perlahan memburuk akibat upaya penyadapan oleh pemerintah Australia. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa salah satu periode lebih baik dari periode lainnya.

**Kata Kunci : Hubungan Bilateral, Kerjasama, Perbandingan.**

### PENDAHULUAN

Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain (Arum Sutrisni, 2020). Kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh suatu negara dengan negara lain biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara-negara yang ada di dunia. Salah satunya adalah kerjasama bilateral. Yaitu, bentuk kerjasama antara dua negara yang biasanya berbentuk hubungan diplomatic, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan (Arum Sutrisni, 2020).

Dalam menjalankan hubungan bilateral, Indonesia kerap mempromosikan bentuk kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menolak adanya penggunaan kekerasan, dan konsultasi serta mengutamakan konsensus dalam pengambilan keputusan. Pada saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan sekitar 162 negara serta satu teritori khusus yang berbentuk *non - self governing territory*, salah satunya yaitu hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia.

Hubungan antara Indonesia dengan Australia telah terjalin sejak berkembangnya masa pelayaran di dunia. Hubungan antara Indonesia dengan Australia berawal saat terjadinya interaksi antara Suku Aborigin dan Suku Bugis yang terjalin sejak masa Kerajaan Gowa yang terletak di Makassar sekitar tahun 1650. Pada saat itu, Suku Bugis mendatangi Australia dengan tujuan untuk

mencari ikan teripang yang nantinya akan dibawa pulang ke Sulawesi. Lebih lanjut, para nelayan Suku Bugis pun mendirikan rumah, menggai sumur serta menanam pohon asam pada saat mereka menunggu angin yang dapat membawa mereka pulang ke Sulawesi. Di sisi lain, banyak penduduk Suku Aborigin yang turut bekerja dengan para nelayan Suku Bugis serta mengikuti kebiasaan menghisap tembakau hingga mempelajari tarian mereka. Pada saat tiba masanya bagi para nelayan Suku Bugis untuk kembali ke Makassar, tak sedikit penduduk Suku Aborigin yang memutuskan untuk ikut berlayar dan kembali ke Australia pada musim berikutnya. Bahkan beberapa diantara mereka memutuskan untuk bermukim di Sulawesi. Pengaruh penduduk Suku Bugis terhadap Suku Aborigin dapat dilihat dari kebiasaan dan bahasa yang digunakan mereka sampai hari ini (Hird, 2009:2-3). Hubungan antara Indonesia dan Australia dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto selalu menunjukkan gambaran yang menarik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara Indonesia dan Australia yang kerap diwarnai pasang surut.

Pada mulanya, hubungan antara Indonesia dengan Australia berlangsung sangat baik. Sejak merdekanya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, hubungan antara Indonesia dengan Australia hampir selalu bergejolak. Meskipun antara Indonesia dan Australia memiliki kepentingan yang relatif sama, namun hubungan antara Indonesia dengan Australia menjadi rapuh karena adanya perbedaan yang cukup besar antara kedua negara yang bersangkutan.

Pada awal tahun 1950, Australia mulai menunjukkan dirinya sebagai negara yang 'menentang' Indonesia. Hal tersebut dikarenakan oleh kebijakan Indonesia yang berada dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berupaya untuk merebut kembali Irian Barat. Disamping itu, pergantian pemerintahan di Australia, yang awalnya berupa Partai Buruh menjadi Partai Koalisi, memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Australia yang disebabkan oleh adanya perbedaan ideologi antara Partai Buruh dengan Partai Koalisi.

Diawal tahun 1960, hubungan antara Indonesia dengan Australia kemudian mencapai titik paling rendah yang ditandai dengan pemerintah Australia merasa keberatan atas klaim Indonesia terhadap Irian Barat dan Indonesia menentang Australia yang memberikan dukungan terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Hal tersebut merupakan akibat atas kepemimpinan Presiden Soekarno yang radikal dan konfrontasi. Politik konfrontasi tersebut kemudian berakhir setelah pemerintahan orde lama jatuh dan adanya tekad pemerintahan Indonesia untuk melaksanakan dan mempertahankan orde baru.

Hubungan antara Indonesia dan Australia yang mengalami pasang dan surut secara berkala selama beberapa dekade tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan luar negeri, ekonomi, dan politik. Namun, baik Indonesia maupun Australia, keduanya kerap berupaya untuk meningkatkan kembali hubungan bilateral agar tetap kokoh.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Literatur atau tulisan yang dijadikan tinjauan pustaka pertama dalam penulisan ini adalah artikel jurnal milik Yeni Wijayanti, Dosen Pendidikan

Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis, yang berjudul “Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia tahun 1945-1995”. Persamaan antara jurnal milik Yeni Wijayanti dengan jurnal ini terletak pada kesamaan topic pembahasan, yaitu hubungan bilateral Indonesia-Australia. Selain itu, kedua jurnal juga sama-sama membahas mengenai pasang surut hubungan antara Indonesia dengan Australia yang tidak selalu baik serta sama-sama terdapat pembahasan mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan Indonesia pada masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Adapun perbedaan antara jurnal milik Yeni Wijayanti dengan jurnal ini terletak pada tahun pembahasan topic mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia, jurnal milik Yeni Wijayanti membahas hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia pada tahun 1945 hingga 1995 sedangkan jurnal ini membahas hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia hanya pada saat Indonesia berada dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, jurnal Yeni Wijayanti membahas secara bertahap dari tahun 1945 hingga 1995 secara lengkap sedangkan jurnal ini hanya membahas mengenai perbedaan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Literatur atau tulisan yang dijadikan tinjauan pustaka kedua dalam penulisan ini adalah skripsi milik Dwi Ana Wiyatiningrum, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul “Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia pada Masa Perdana Menteri Kevin Rudd (2007-2013)”. Persamaan antara skripsi milik Dwi Ana Wiyatiningrum dengan jurnal ini terletak pada kesamaan topic pembahasan, yaitu hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia. Adapun perbedaan antara skripsi milik Dwi Ana Wiyatiningrum dengan jurnal ini terletak pada tahun hubungan bilateral terjadi, skripsi milik Dwi Ana Wiyatiningrum hanya membahas hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia dalam jangka waktu 6 tahun, yaitu pada tahun 2007 hingga tahun 2013 sedangkan jurnal ini membahas mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia pada tahun 1967 hingga 1998 dan tahun 2004 hingga 2014. Selain itu, skripsi milik Dwi Ana Wiyatiningrum membahas mengenai hubungan bilateral Indonesia dengan Australia melalui sudut pandang Australia, yaitu pada masa Perdana Menteri Kevin Rudd sedangkan jurnal ini membahas mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia melalui sudut pandang Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Secara umum, penulisan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia. Secara khusus, penulisan ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang perbedaan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia yang lebih mengerucut pada era Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif sebagaimana penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang bersifat *Cross Sectional* atau dalam waktu tertentu sebagaimana penulisan ini berisikan penjelasan mengenai perbandingan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia pada era Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono.

## **PEMBAHASAN**

### **Hubungan Bilateral Indonesia-Australia dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto**

Hubungan antara Indonesia dengan Australia yang sempat memburuk pada masa Orde Lama, namun hubungan antara keduanya kembali membaik pada saat pergantian pemerintahan di Indonesia yang dikenal dengan Orde Baru yang disambut baik oleh para politisi di Australia. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dengan segera diakui oleh Australia karena Australia melihat bahwa Indonesia menunjukkan sikap anti-komunis yang tegas dan menjalankan kebijakan luar negeri yang pro Barat. Selain itu, Australia juga menilai bahwa politik luar negeri Soeharto tidak seperti politik luar negeri Soekarno yang agresif. Politik luar negeri Soeharto dianggap lebih lunak karena pemerintahannya lebih tertarik dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, kecuali dalam pengambilalihan Timor Timur yang merupakan mantan koloni Inggris.

Australia kemudian bergabung ke dalam kelompok negara-negara donor yang dibentuk khusus guna membantu pembangunan perekonomian di Indonesia, yaitu *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI). Pada tahun 1968, Australia memberikan dukungan penuh terhadap gagasan Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya yang membentuk organisasi regional, yaitu *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) yang mempunyai tujuan untuk menciptakan kestabilan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan ASEAN dianggap memiliki dampak yang positif bagi Australia, setidaknya dalam mengurangi rasa khawatir Australia terhadap isolasi negaranya dan memberikan jaminan rasa aman yang lebih besar bagi Australia.

Sejak saat itu, hubungan antara Indonesia dengan Australia menunjukkan perubahan yang luar biasa. Perubahan tersebut dilihat dari pernyataan laporan tahunan Kementerian Luar Negeri bahwa "Hubungan Bilateral Australia dengan Indonesia menjadi Baik". Dalam upaya membangun kembali hubungan dengan cara yang baik, Menteri Luar Negeri Australia membuat kunjungan ke Indonesia pada tahun 1966 dan 1967. Tak hanya itu, Australia pun memberikan bantuan di bidang ekonomi bagi Indonesia. Bantuan tersebut terus berlanjut bahkan alirannya semakin meningkat.

Dalam kunjungan yang dilakukan Menteri Luar Negeri Australia, William McMahon, kepada Menteri Perdagangan Indonesia, Dr. Soemitro Djohadikusumo, pada bulan Desember 1970, mengumumkan dukungan bantuan sipil untuk proyek Indonesia yang bernilai lebih dari 11 juta dollar.

Hal lain yang mendorong terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dengan Australia adalah penentuan garis batas antara Irian Jaya dengan Papua

New Guinea. Australia berhasil menyepakati penentuan garis batas antara Irian Jaya dan Papua New Guinea dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1973. Pada saat itu, Australia berperan sebagai negara yang mewakili kepentingan luar negeri Papua New Guinea. Sejak Australia berhasil menyepakati penentuan garis batas antara Irian Jaya dengan Papua New Guinea, hubungan antara Indonesia dan Australia di bidang ekonomi dan perdagangan semakin mengalami peningkatan.

Pada tahun 1972 hingga 1988, hubungan antara Indonesia dengan Australia mengalami permasalahan-permasalahan yang berakibat pada fluktuasi hubungan antara keduanya. Yang dinilai paling memberikan dampak yang mengganggu dalam hubungan antara Indonesia dengan Australia adalah permasalahan Timor Timur. Permasalahan tersebut mewarnai kebijakan luar negeri Australia sejak tahun 1974 hingga 1983.

Selama tahun 1980-an, hubungan antara Indonesia dengan Australia kerap diganggu oleh permasalahan Timor Timur. Meskipun pemerintah Australia berupaya menjaga hubungan baik dengan Indonesia, namun media-media dan beberapa kelompok penekan di Australia tidak menghendaki penghentian permasalahan Timor Timur. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan media Australia dengan Indonesia. Permasalahan tersebut berhubungan dengan tewasnya 5 orang wartawan Australia pada saat melakukan peliputan peperangan yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1975. Kepentingan media-media Australia sepertinya bertemu dengan aspirasi kelompok orang-orang Timor Timur di Australia yang menentang penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Kelompok orang-orang Timor Timur yang bermukim di Australia tersebut kemudian menggunakan hampir semua pers Australia yang berpengaruh untuk melaksanakan kampanye berupa pengecaman penggabungan Timor Timur yang diistilahkan sebagai 'pencaplokan' ke dalam wilayah Indonesia. Kecaman kelompok tersebut dan media Australia yang dilakukan secara terus menerus terhadap persoalan Timor Timur mengakibatkan timbulnya persepsi yang keliru dari Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Australia yang membiarkan kecaman media Australia terhadap permasalahan Timor Timur dianggap sebagai sikap yang tidak bersahabat oleh Pemerintah Indonesia dan memberikan dukungan atas kepentingan kelompok-kelompok yang anti-Indonesia tersebut. Pada akhirnya, hal tersebut membuat hubungan antara Indonesia dengan Australia menjadi memburuk pada tahun 1980 hingga 1983. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah keras bagi perwakilan-perwakilan media Australia yang ada di Indonesia, yaitu pelarangan beredarnya surat kabar Australia di Indonesia dan penutupan kantor perwakilan ABC di Jakarta yang disebabkan oleh pembohongan visa kepala perwakilannya ditolak Pemerintah Indonesia.

### **Hubungan Bilateral Indonesia-Australia dibawah Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono**

Hubungan bilateral yang dijalin oleh Indonesia dengan Australia berjalan cukup stabil. Salah satu tonggak penting dalam terjalannya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia adalah ditandatanganinya *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* oleh masing-masing kepala negara baik Indonesia

maupun Australia pada tanggal 5 April 2005, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri John Howard. Penandatanganan *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* dianggap sebagai kesepakatan kedua belah negara untuk melakukan kerjasama di seluruh lini. Hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Australia di berbagai bidang semakin mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin intensifnya kegiatan saling mengunjungi pada tingkat pemimpin dan pejabat tinggi antara Indonesia dengan Australia dan berbagai pertemuan konsultasi yang dilaksanakan pada tingkat bilateral, regional, hingga internasional.

Pada tahun 2010, Australia dan Indonesia menorehkan sejarah baru dalam hubungan bilateral kedua belah pihak yang bersangkutan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Maret tahun 2010 melakukan kunjungan ke Australia untuk menerima penghargaan *Honorary Companion of the Order of Australia* sekaligus memberikan pidato di depan Parlemen Australia. Momen tersebut merupakan suatu momen langka mengingat selama 109 tahun terbentuknya Pemerintahan Federal Australia, parlemen baru memberikan kesempatan untuk berpidato sebanyak lima kali bagi para pemimpin dunia, termasuk diantaranya Presiden Amerika Serikat yaitu George W. Bush. Dalam konteks hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Australia, bentuk-bentuk penghormatan yang telah disebutkan sebelumnya mempunyai makna politik yang luas. Penghormatan tersebut merupakan simbol bahwa Indonesia merupakan negara yang dinilai sangat penting oleh Australia (Wuryandari, 2010).

Secara domestik, Indonesia dianggap sebagai suatu negara yang terbilang cukup sukses dalam melewati proses transformasi demokrasi yang kerap dihujani oleh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dari menguatnya peran parlemen, kebebasan akan mengemukakan pendapat, dan toleransi yang cukup tinggi terhadap umat beragama. Selain itu, Indonesia pun dianggap sukses dalam menangani permasalahan-permasalahan terkait terorisme dan *illegal migration*.

Adapun secara regional dan internasional, Indonesia dianggap cukup cemerlang dalam menjalankan perannya secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari peran Indonesia yang cukup besar di berbagai bentuk kerjasama regional, seperti ASEAN, ASEAN+3, APEC, dan G 20 yang membuat Australia menjadikannya sebagai nilai tambahan yang bersifat positif. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia menggarisbawahi cara pandang Australia dalam memandang Indonesia. Australia tidak lagi melihat Indonesia sebagai negara yang secara potensial dapat menjadi ancaman, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang datang dari Utara terhadap Australia. Akan tetapi, Australia melihat Indonesia sebagai sebuah negara berkembang dengan mayoritas penduduknya merupakan penganut agama Islam yang kehidupannya semakin maju, baik secara demokrasi, ekonomi, maupun secara geo strategis yang merupakan hal yang sangat penting bagi Australia. Terdapat lebih dari 40 persen jalur perdagangan Australia ke negara-negara di Asia Timur khususnya Jepang melewati perairan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dianggap sebagai sebuah negara yang mempunyai potensi yang cukup besar

dalam melakukan penyeimbangan kekuatan China yang semakin meningkat di kawasan.

Hubungan antara Indonesia dengan Australia yang terbilang cukup hangat sebagaimana direfleksikan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Australia tidak lantas berarti bahwa Indonesia dan Australia tidak mempunyai kendala atau tantangan dalam menjalankan hubungan yang dijalanakan oleh kedua belah pihak. Salah satu permasalahan yang terbilang cukup krusial dalam membangun hubungan antara Indonesia dengan Australia adalah masih berkembangnya *stereotype* yang berkembang baik di Indonesia maupun di Australia. Pada tingkat *Government to Government* atau pemerintah dengan pemerintah, baik Indonesia maupun Australia nampak tidak mempunyai masalah. Namun, pada tingkat *People to People* atau masyarakat dengan masyarakat secara realitas dapat ditemukan permasalahan yang terjadi. Contohnya, berdasarkan hasil *polling* yang dilakukan oleh *Lowy Institute* pada bulan Juli tahun 2009, terdapat sekitar 45 persen tingkat kepercayaan masyarakat Australia yang terbilang cukup rendah terhadap Indonesia. Salah satu yang menjadi pemicu terjadinya hal tersebut adalah sebagian besar masyarakat Australia masih memandang Indonesia yang sebagian besar penduduknya merupakan penganut agama Islam sebagai “momok”.

Di lain sisi, sebagian penduduk Indonesia pun masih memandang Australia sebagai negara yang kurang bisa dipercaya dan mempunyai tujuan-tujuan yang kurang baik. Hal tersebut didasari oleh pengalaman kiprah Australia baik pada saat penentuan maupun setelah penentuan pendapat di Timor Leste yang sepertinya tidak mudah dihapuskan dari memori ingatan sebagian besar penduduk Indonesia. Keterlibatan kelompok masyarakat di Australia terhadap gerakan separatism di Papua pun memperkuat munculnya pandangan maupun pemikiran negative atas negara tetangga yang berada di posisi selatan Indonesia tersebut.

Dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Tony Abbot, Indonesia dan Australia menjalin hubungan berupa kerjasama terkait isu penyelundupan manusia. Kerjasama tersebut dianggap sebagai kunci bagi Australia yang pada saat itu berupaya menghentikan aliran pencari suaka yang datang ke Australia menggunakan perahu Indonesia. Pada saat itu, pencari suaka merupakan isu yang kerap menjadi pembahasan di Australia. Usaha menghentikan masuknya para pencari suaka ke Australia merupakan salah satu program prioritas Tony Abbot pada saat pemilihan umum. Tony Abbot menkampanyekan untuk melakukan pembendungan pencari suaka dan memerintahkan kapal pengangkut pencari suaka untuk kembali ke Indonesia.

Namun, hubungan yang dijalin oleh Indonesia dengan Australia yang berupa kerjasama ini tidak berlangsung lama. Hal tersebut diakibatkan oleh mata-mata Amerika, Edward Snowden, membocorkan rahasia Australia yang pernah mencoba menyadap telepon genggam milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya beserta para menteri Indonesia. Hal tersebut dikuatkan dengan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa Australia telah memata-matai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya beserta menteri-menteri senior.

Tindakan yang dilakukan oleh Australia tersebut menyebabkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memecan Perdana Menteri Australia yang menjabat pada saat itu, yaitu Tony Abbot. Tindakan tersebut juga memicu Jakarta untuk melakukan pembekuan terhadap kerjasama militer dan kerjasama lainnya termasuk upaya memerangi kelompok yang memanfaatkan para pencari suaka untuk memasuki perairan Australia Utara (Mercer, 2013). Hal tersebut membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggukkan perjanjian-perjanjian, kecuali penolakan Tony Abbot untuk meminta maaf atas tindakan yang dilakukan oleh dirinya.

Penyadapan yang dilakukan oleh Australia dianggap memberikan dampak yang merugikan bagi negara Indonesia. Penyadapan yang dilakukan oleh Australia dianggap sebagai tindakan yang telah melecehkan Indonesia dan dalam kasus nasionalisme Australia telah melanggar kedaulatan Indonesia yang menyangkut kerahasiaan dan informasi negara. Selain itu, penyadapan tersebut juga dilakukan terhadap petinggi-petinggi Indonesia yang mana dalam hal ini tindakan tersebut merupakan masalah yang serius apabila data yang diperoleh disalahgunakan oleh Australia. Misalnya, Australia akan mengetahui kebijakan luar negeri Indonesia dan Australia dapat mengontrol kebijakan Indonesia tersebut dengan mudah.

Jika Australia tidak berusaha untuk beritikad baik dengan mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf kepada Indonesia, hal tersebut tentunya akan menjadi kerugian tersendiri bagi hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Australia. Isu penyadapan ini muncul pada saat hubungan antara Indonesia dengan Australia baik-baik saja, maka bisa jadi Australia akan kehilangan hubungan kerjasama dengan Indonesia dan terancam kehilangan pengaruhnya di Asia khususnya dalam hal Indonesia merupakan kunci bagi masuknya pengaruh Canberra ke Asia. Selain itu, tindakan penyadapan Australia ini juga melanggar Hukum Internasional yang akan merugikan negara tersebut apabila Indonesia melaporkan tindakan Australia kepada Mahkamah Internasional PBB (Marbun, 2013).

Terkait penyadapan yang dilakukan intelijen Australia, Pemerintah Indonesia kemudian memberikan reaksi keras. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa pemerintah telah melaksanakan protes keras atas aksi tersebut dan menyatakan akan melakukan peninjauan kembali terhadap sejumlah agenda kerjasama bilateral. Sambil menunggu penjelasan dan klarifikasi dari pemerintah Australia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memanggil Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia yaitu Nadjib Riphath untuk datang ke Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan 3 langkah yang akan ditempuh oleh Indonesia terhadap Australia terkait kasus penyadapan tersebut. Pertama, Indonesia akan menunggu penjelasan dan tanggung jawab Australia terkait kasus tersebut. Kedua, sejumlah agenda kerjasama antara Indonesia dengan Australia akan dikaji kembali dengan menerapkan pemberhentian sementara terhadap kerjasama pertukaran informasi dan inteligen serta latihan bersama antara tentara dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketiga, perlu adanya



semacam protokol atau kode etik dan *guiding principle* dalam melanjutkan hubungan antara Indonesia dengan Australia yang menyangkut kerjasama di berbagai bidang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Tony Abbot dengan tujuan untuk meminta penjelasan terkait penyadapan yang dilakukan terhadap para petinggi Indonesia. Namun, di hadapan parlemen, Perdana Menteri Tony Abbot merasa tidak perlu memberikan penjelasan maupun meminta maaf kepada Indonesia dengan alasan bahwa penyadapan tersebut dilakukan untuk kepentingan keamanan negaranya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengomentari balasan Perdana Menteri Tony Abbot dengan mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan bahwa beliau menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Tony Abbot yang menganggap remeh kasus penyadapan terhadap Indonesia tanpa adanya rasa bersalah dan permohonan maaf dari Pemerintah Australia. Kekecewaan tersebut kemudian menghasilkan respon tegas Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Australia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian berdiskusi dengan Wakil Presiden Boediono beserta beberapa menteri dan pejabat terkait yang disampaikan pada 26 November 2013 dalam 6 butir. Pertama, penugasan terhadap Menteri Luar Negeri atau atasan khusus untuk berdiskusi secara mendalam dan serius terkait hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia termasuk isu-isu yang sensitive. Kedua, penindaklanjutan dengan pembahasan protokol dan kode etik kerjasama kedua belah pihak dengan lengkap dan mendalam setelah terjadinya *mutual understanding* dan *mutual agreement*. Ketiga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memeriksa sendiri draf protokol dan kode etik tersebut, apakah sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia. Keempat, setelah disahkannya protokol dan kode etik, pengesahan dilakukan dihadapan kepala pemerintahan baik Indonesia maupun Australia. Kelima, kedua negara kemudian bertugas untuk membuktikan bahwa protokol dan kode etik tersebut dipenuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya. Terakhir, setelah kedua negara khususnya Indonesia kembali mempunyai kepercayaan dan kemudian protokol serta kode etik dijalankan dengan benar, maka kerjasama bilateral yang secara nyata memberikan manfaat bersama dapat dilanjutkan, termasuk kerjasama militer dan kepolisian kedua belah negara yang bersangkutan.

Dalam memenuhi tuntutan Indonesia untuk menyelesaikan kasus penyadapan, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop kemudian melakukan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 5 Desember 2013 dan menyatakan rasa setuju terhadap enam langkah yang diusulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna menormalisasi hubungan antara Indonesia dengan Australia. Setelah pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Australia kemudian melanjutkan diplomasi dengan melakukan komunikasi berbagai konsep guna merancang kesepakatan *Code of Conduct* atau kode etik.

Dalam surat balasan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Tony Abbot mengatakan komitmennya bahwa Australia tidak akan melakukan tindakan di masa depan yang dapat merugikan maupun mengganggu Indonesia serta menyetujui dan mendukung usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali menata kerjasama bilateral antara Indonesia

dengan Australia termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas, adil, dan dapat dipatuhi. Selain itu, Perdana Menteri Tony Abbot juga mengatakan keinginan Pemerintah Australia untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia yang pada kenyataannya telah berada pada kondisi yang kuat dan berkembang.

Dalam melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang sempat mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia, langkah-langkah bersama guna mengatasi permasalahan tersebut kerap dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri Tony Abbot setelah pertemuan bilateral di Batam, Kepulauan Riau. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa Indonesia telah mengajukan agar protokol dan *code of conduct* atau kode etik dapat diselesaikan dalam waktu dekat agar peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Australia dapat berlangsung baik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Tony Abbot kemudian sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan mencari peluang baru guna meningkatkan kerjasama.

Indonesia dan Australia kemudian menandatangani Tata Perilaku untuk *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation*. Penandatanganan *Code of Conduct* ini pun dinamai dengan *The Lombok Treaty* atau Perjanjian Lombok. Dalam aturan tersebut keduanya menyepakati untuk tidak melakukan tindakan yang memberikan dampak yang merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu termasuk diantaranya yaitu penyadapan. Penandatanganan ini dianggap sebagai suatu langkah maju dalam upaya pemulihan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia setelah kasus penyadapan secara penuh. Dengan penandatanganan ini, hubungan antara Indonesia dengan Australia akan semakin membaik dengan pemulihan kembali komunikasi antara angkatan bersenjata kedua belah negara yang bersangkutan seperti sedia kala.

### **Perbandingan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Era Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono**

Berdasarkan penjelasan mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia era Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa tiap-tiap presiden memiliki gelombang pasang dan surutnya masing-masing. Permasalahan antara Indonesia dengan Australia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan lebih panas tidak lantas menjadikan hubungan antara Indonesia dengan Australia pada era Presiden Soeharto dianggap lebih baik. Perbedaan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia pada era Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terletak pada bentuk kerjasama guna menjalin hubungan bilateral yang baik dan konflik yang menjadi pemicu bergejolaknya hubungan antara Indonesia dengan Australia.

Pada era Soeharto, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia pada awalnya berjalan baik karena Australia menganggap politik luar negeri Soeharto cenderung lebih lunak dibandingkan sebelumnya pada era orde lama. Hubungan baik antara Indonesia dan Australia kemudian terjalin baik dan

semakin membaik ketika Australia kerap memberikan dukungan kepada Indonesia. Tak hanya itu, hubungan baik diantara Indonesia dengan Australia pun dipicu oleh keberhasilan Australia dalam menyepakati penentuan garis batas antara Irian Jaya dan Papua New Guinea dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1973 yang mana pada saat itu Australia berperan sebagai negara yang mewakili Papua New Guinea. Sedangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hubungan antara Indonesia dengan Australia memang sudah terjalin dengan baik. Hubungan tersebut kemudian semakin membaik ketika Australia memberikan penghargaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kunjungannya ke Australia dan memberikan kesempatan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berpidato di depan Parlemen Australia yang dianggap sebagai momen langka. Pada saat pergantian perdana menteri di Australia, Indonesia kemudian menjalin kerjasama dengan Australia dalam isu penyelundupan manusia.

Hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dengan Australia baik pada era Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menemukan konflik. Pada era Presiden Soeharto, konflik antara Indonesia dengan Australia diawali dengan tewasnya 5 jurnalis Australia pada saat melakukan peliputan dalam konflik di Timor Timur. Tewasnya 5 jurnalis Australia tersebut kemudian dimanfaatkan oleh penduduk Timor Timur guna mengajak media-media Australia untuk memberikan kecaman kepada Indonesia atas upaya 'pencaplokan' Timor Timur. Hubungan antara keduanya kemudian semakin memburuk karena Pemerintah Australia tidak melakukan tindakan apapun atas kecaman yang diberikan kepada Indonesia sehingga Pemerintah Indonesia menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk dukungan Pemerintah Australia untuk mengecam Indonesia. Melihat hal tersebut Pemerintah Indonesia kemudian melakukan tindakan tegas terhadap Australia berupa pelarangan beredarnya surat kabar Australia dan penutupan kantor perwakilan ABC. Sedangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, konflik antara Indonesia dengan Australia dipicu oleh upaya penyadapan Pemerintah Australia terhadap para petinggi Indonesia. Mengetahui hal tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian meminta Australia untuk memberikan penjelasan dan meminta maaf atas tindakan yang dilakukannya. Namun, permintaan Pemerintah Indonesia tersebut mendapatkan penolakan dari Pemerintah Australia. Penolakan tersebut merupakan suatu tindakan yang amat disayangkan dan menimbulkan kekecewaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya memicu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan tindakan tegas terhadap Pemerintah Australia dengan mengukuhkan kerjasama-kerjasama secara sementara.

## **KESIMPULAN**

Hubungan antara Indonesia dengan Australia sudah terjalin sejak lama. Namun, hubungan antara keduanya kerap mengalami pasang dan surut dalam setiap periode pemerintahan. Pada era Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hubungan antara Indonesia dengan Australia tentunya memiliki hubungan baik dan konfliknya masing-masing yang kemudian mewarnai hubungan antara Indonesia dengan Australia. Tidak dapat dikatakan bahwa hubungan antara Indonesia dengan Australia pada era Presiden Soeharto lebih

baik dibanding hubungan antara Indonesia dengan Australia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan oleh masing-masing periode pemerintahan memiliki kerjasama yang berbeda dalam mencapai tujuannya dan konflik yang berbeda pula.

Pada era Presiden Soeharto, hubungan baik antara Indonesia dengan Australia terjalin karena politik luar negeri Soeharto yang dianggap lebih lunak dibandingkan pemerintahan sebelumnya, dukungan Australia terhadap Indonesia, dan keberhasilan Australia dalam penyelesaian konflik garis batas antara Papua New Guinea dengan Irian Jaya. Keharmonisan antara Indonesia dengan Australia kemudian mulai memudar pada tahun 1980-an karena konflik Timor Timur. Hubungan yang memudar tersebut dipicu oleh tewasnya jurnalis-jurnalis Australia yang kemudian menjadi semakin memburuk akibat konflik Timor Timur yang menuai kecaman media Australia terhadap Pemerintah Indonesia. Kecaman tersebut kemudian membuat citra Indonesia menjadi buruk di mata internasional. Atas kecaman dan tindakan Pemerintah Australia yang bungkam terhadap kecaman media Australia kepada Indonesia dianggap sebagai bentuk dukungan Pemerintah Australia. Pemerintah Indonesia kemudian melakukan tindakan tegas terhadap Pemerintah Australia.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hubungan antara Indonesia dengan Australia dapat dibilang cukup baik pada saat Australia berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri John Howard. Konflik antara Indonesia dengan Australia mulai timbul pada saat Australia berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbot. Meskipun pada mulanya hubungan antara Indonesia dengan Australia terjalin baik dengan melakukan kerjasama dalam isu penyelundupan manusia, namun hubungan baik tersebut tidak lantas berjalan lama. Hal tersebut dipicu oleh upaya penyadapan telepon seluler para petinggi Indonesia oleh Pemerintah Australia dan penolakan atas penjelasan serta permintaan maaf yang diminta oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Australia. Melihat hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengukuhkan bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Australia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hird, Lew. Lembaga Australia-Indonesia. *Hubungan antara Australia dan Indonesia*. (Online), (<http://www.dfat.gov.au/aia/publications/bab11/index.html>)
- Marbun, Julkifli. 2013. 'Australia Terancam Kehilangan Pengaruh di Asia', (Online), (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/11/21/mwm1e4-australia-terancam-kehilangan-pengaruh-di-asia>, diakses 14 April 2020).
- Mercer, Phill. 2013. Australia Berusaha Perbaiki Hubungan dengan Indonesia Pasca Skandal Penyadapan, (Online), (<https://www.voaindonesia.com/a/australi-berusaha-perbaiki-hubungan-dengan-indonesia/1800026.html>, diakses 7 April 2020).
- Permatasari, Rd. 2017. "Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pasca Kasus Penyadapan Pada Era Pemerintahan SBY dan Implikasinya Terhadap

- Kerjasama Militer Indonesia-Australia”. Skripsi. FISIP, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, Bandung.
- Putri, Arum Sutrisni. 2020. Contoh Kerja Sama Internasional Indonesia, (Online), (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/203000669/contoh-kerja-sama-internasional-indonesia?page=all>, diakses 16 Maret 2020)
- Rhama, B. (2014). Hubungan Antara Nilai Yang Dimiliki Stakeholder Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. *JISPAR*, 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH
- Rhama, B. (2020). The Human Resource Policy of Tourism in Indonesia. *Opción*, 36(26), 3142-3162
- Wijayanti, Y. 2015. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia. Universitas Gadjah Mada, 7(09), 6.
- Wiyatiningrum, D. 2015. Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia pada Masa Perdana Menteri Kevin Rudd (2007-2013). Universitas Negeri Yogyakarta, 3(2), 54-67
- Wuryandari, Ganewati. 2010. Arti Penting Kunjungan SBY ke Australia, (Online), (<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/214-arti-penting-kunjungan-sby-ke-australia-#:~:text=Penghormatan%20tersebut%20merupakan%20simbol%20bahwa,di%20nilai%20sangat%20penting%20oleh%20Australia.>, diakses 14 April 2020).